

BAB I

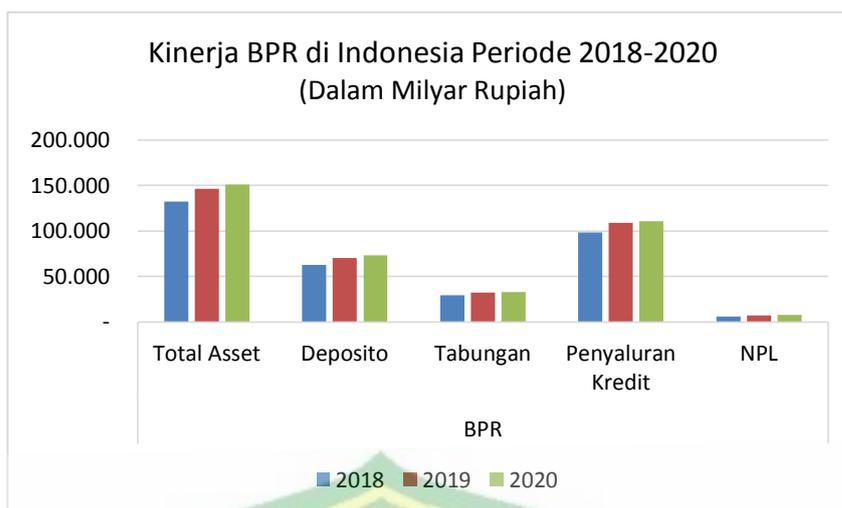
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Indonesia dapat dilihat melalui munculnya lembaga-lembaga keuangan. Pada awal perkembangannya lembaga keuangan di Indonesia hanya konvensional berbasis bunga dengan orientasi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Pada krisis moneter tahun 1998 lembaga keuangan yang berbasis bunga mengalami kebangkrutan karena tingginya suku bunga pinjaman, sehingga membuat masyarakat lebih tertarik dengan lembaga keuangan syariah yang terhindar dari bunga karena lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil (Zubair, 2016).

Lembaga keuangan sebagai badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman, dibandingkan dengan aset non keuangan (Mukhtar, 2016). Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan bank. Adapun bentuk lembaga keuangan non bank: Modal ventura, anjak piutang, asuransi, dana pension, pegadaian, pasar modal, pasar uang dan reksadana. Sedangkan bentuk lembaga keuangan bank, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat.

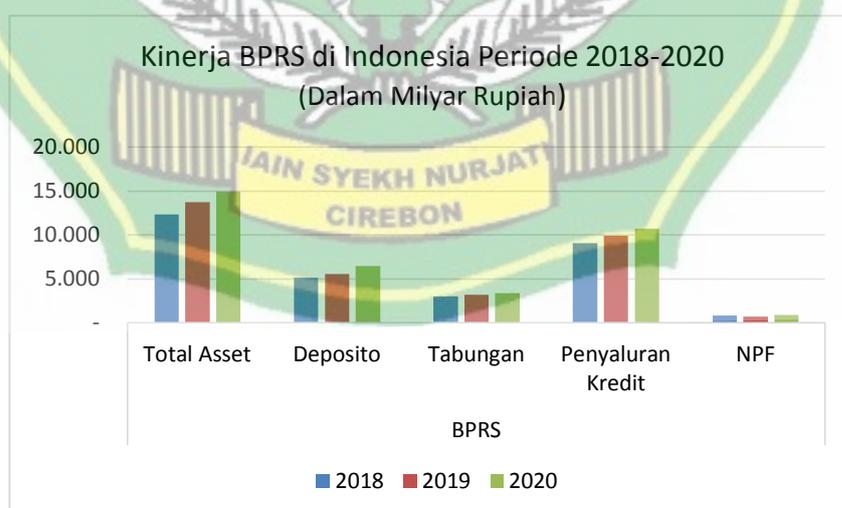
Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit yang kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional maupun syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran (Herli, 2013). Bank Perkreditan Rakyat terbagi menjadi dua jenis yaitu BPR dan BPRS. Pada perkembangannya, BPR dan BPRS mencatatkan peningkatan kinerja yang signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pada periode 2018-2020, berikut tergambar pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Kinerja BPR di Indonesia Periode 2018-2020

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan Total asset BPR secara signifikan dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 total asset sebesar Rp 132,474 Triliun, tahun 2019 diperoleh total asset sebesar Rp 146,545 Triliun, sedangkan tahun 2020 diperoleh total asset sebesar Rp 151,064 Triliun. Deposito, tabungan, penyaluran kredit dan NPL pada BPR juga mengalami kenaikan(OJK, 2021a).



Gambar 1.2
Kinerja BPRS di Indonesia Periode 2018-2020

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan Total asset BPRS secara signifikan dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 total asset sebesar Rp 12,362 Triliun, tahun 2019 diperoleh total asset sebesar Rp 13,758 Triliun, sedangkan tahun 2020 diperoleh total asset sebesar Rp 14,950 Triliun. Deposito, tabungan, penyaluran kredit dan NPL pada BPR juga mengalami kenaikan (OJK, 2021).

Industri BPR dan BPRS dalam kondisi yang sehat, terjaga dan masih tumbuh positif. Hal ini dapat dilihat dari sisi aset industri BPR sebesar Rp 151,064 Triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 146,545 Triliun. Sedangkan aset BPRS tumbuh sebesar Rp 14,950 Triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 13,758 Triliun.

Menurut Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mencakup Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam kurun waktu 17 tahun, bank syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, meskipun secara nasional market share bank syariah masih rendah dibandingkan dengan bank konvensional (Ismail, 2011).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan ekonomi atau perbankan berdasarkan prinsip Islam atau syariah yang mengharamkan riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di desa, kecamatan, hingga kabupaten. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga memiliki payung hukum dalam pendiriannya yaitu PBI No. 11/23/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) memiliki peran penting dalam mendorong sector riil. Sebabnya, BPRS berperan dalam mendukung perkembangan sector usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penyaluran pembiayaan. Selain itu, Bank Indonesia berharap perkembangan ekonomi syariah di dukung juga dengan pesatnya pertumbuhan BPRS. Karena itu, perlu adanya dorongan kepada industri BPRS agar dapat terus berkembang.

Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada saatnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan BI Nomor 11/23/PBI/2009 menyebutkan bahwa keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan pelayanan perbankan yang cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan yang belum terjangkau oleh Bank Umum (P. B. Indonesia, 2009)

Berdasarkan data publikasi OJK menyebutkan per 31 desember 2020 aset BPRS tercatat berada pada posisi Rp. 14,95 Triliun, Sedangkan penyaluran pembiayaan BPRS tercatat berjumlah Rp 10,68 Triliun. Sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) BPRS tercatat sebesar Rp. 9,82 Triliun (OJK, 2020)

Penting untuk mengevaluasi kinerja bank, baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, atau pihak lain yang berkepentingan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Tujuan laporan di sektor perbankan syariah adalah untuk memberikan informasi berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan kegiatan operasi perbankan yang berguna dalam pengambilan keputusan (Aolia, 2017). Pengguna informasi akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Pemakai internal, antara lain: Direktur dan manager keuangan, direktur operasional dan manager pemasaran, manager dan supervisor produksi dan pemakai internal lainnya. Sedangkan untuk pemakai eksternal, antara lain: Investor, kreditor, pemerintah, badan pengawas pasar modal, ekonom, praktisi, dan analis (Hery, 2019).

Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan prinsip syariah dapat diukur dengan *Index Maqashid Syariah*, Index Islam atau alat ukur lainnya lainnya seperti CAMELS (*Modal, Assets, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market*) dan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*). Meskipun dalam pelaksanaannya, alat ukur konvensional memiliki banyak kelemahan. Pertama, masih sulit untuk membedakan karakteristik antar bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan ini terjadi karena

perbedaan pandangan tentang keuangan Islam yang mempengaruhi fungsinya sebagai perantara serta kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan peraturan daerah. Kedua, banyak hasil penelitian yang menyatakan bahwa dalam mengukur kinerja bank syariah tentu tidak sama dengan mengukur bank konvensional, karena keduanya sangat berbeda dalam fungsi dan karakteristik operasional. Ketiga, kondisi ini juga menunjukkan bahwa tujuan dasar perbankan syariah itu sendiri belum ditanggapi secara serius, sehingga dalam mengukur kinerja perbankan syariah masih menggunakan pengukuran konvensional yang hanya berfokus pada pengukuran keuangan. Meskipun ada kebutuhan untuk mengembangkan ukuran kinerja perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena perlu adanya pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah agar alat ukur tersebut sesuai dengan *Maqashid Syariah* (Al-ghifari et al., 2015).

Penerapan *maqashid syariah* oleh perbankan syariah telah menjadi perhatian beberapa peneliti ekonomi Islam meskipun jumlahnya masih sedikit terbatas. Mustafa, O.M melalui penelitiannya telah melakukan pengukuran kinerja *maqashid* perbankan syariah berupa *index maqashid syariah*. *Maqashid syariah* yang diukur dalam penelitian ini didasarkan pada konsep *maqashid syariah* yang dijelaskan oleh Muhammad Abu zahrah bahwa terdapat tiga tujuan keberadaan syariat Islam yaitu: *Tahzib al-Fardi* (Mendidik Manusia), *Iqamah Al adl* (Menegakkan Keadilan) dan *Jalb Maslahah* (Kepentingan Publik) yang diukur melalui beberapa parameter berdasarkan ketiga aspek tersebut (Afrinaldi, 2016). Sedangkan menurut Abu hamid al-Ghazali membagi *maqashid syariah* kedalam lima aspek, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta (Ritonga & Safitri, 2021).

Sedangkan menurut kuppusamy (2010) dalam penelitiannya memperkenalkan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) sebagai metode dan alat ukur kinerja keuangan bank syariah. Metode ini untuk menggabungkan index kesesuaian syariah serta tetap memperhatikan profitabilitas. Indikator dalam pengukuran ini terbagi dua yaitu, indikator *sharia conformity*: Investasi syariah, pendapatan syariah dan rasio bagi hasil.

Dan untuk indikator yang diukur dalam *profitability* yaitu *return on asset*, *return on equity* dan *profit margin*. Metode ini untuk menunjukkan ketaatan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*). Dalam sejarah perkembangan perbankan syariah, alasan utama keberadaan bank syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat Islam ingin melakukan semua aktivitas keuangan berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah. Oleh karena itu jaminan kepatuhan terhadap syariah (*shariah compliance*) dari mulai operasional hingga pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah ini sangat penting (Hafizh, 2018).

Pengukuran kinerja keuangan berbasis syariah diperlukan dan dilaksanakan agar pemangku kepentingan dan masyarakat puas dengan kinerja yang dihasilkan. Perspektif pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai Bank Syariah di tinjau dalam hal prinsip dan operasional telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan benar. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengukur kinerja keuangan bank syariah menggunakan metode yang telah disesuaikan dengan perbankan syariah, yaitu *maqashid syariah index* dan *sharia conformity and profitability* (SCnP).

Umat muslim membutuhkan sistem akuntansi syariah sebagai alat pendukung untuk implementasi ekonomi syariah dalam tatanan kehidupan sosial dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan ekonomi terutama oleh lembaga keuangan syariah sangat membutuhkan sistem akuntansi yang mendukung semua transaksi keuangan yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Hal ini dikarenakan konsep akuntansi syariah adalah yang paling menguntungkan dan transparan dalam menentukan akuntabilitas neraca suatu perusahaan, baik bisnis syariah maupun bisnis konvensional (Apriyanti, 2017).

Untuk itu, dengan adanya ungkapan di atas maka penulis merasa perlu sekali untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul: **“Analisis Kinerja Keuangan BPRS HIK Parahyangan Menggunakan Pendekatan *Maqashid Syariah Index* dan *Shariah Conformity and Profitability* Periode 2018-2020”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan terlebih dahulu maka penulis dapat diambil identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Alat ukur kinerja konvensional tidak sama dengan bank syariah karena keduanya berbeda fungsi dan karakteristik operasionalnya
2. Diperlukan pengukuran kinerja keuangan bank syariah berbasis syariah
3. Diperlukannya evaluasi kinerja bank untuk menjaga kepercayaan terhadap bank

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (BPRS HIK) Parahyangan pada tahun 2018-2020 berdasarkan *maqashid syariah index* (MSI)?
2. Bagaimana kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (BPRS HIK) Parahyangan pada tahun 2018-2020 berdasarkan *shariah conformity and profitability* (SCnP)?
3. Bagaimana perbandingan kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (BPRS HIK) Parahyangan berdasarkan *maqashid syariah index* dan *shariah conformity and profitability*?

D. Tujuan Penelitian

Setelah memahami permasalahan yang diteliti ada tujuan pada penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan, yaitu:

1. Mengetahui kinerja BPRS HIK Parahyangan berdasarkan *maqashid syariah index* pada tahun 2018-2020
2. Mengetahui kinerja BPRS HIK Parahyangan berdasarkan *shariah conformity and profitability* pada tahun 2018-2020
3. Untuk mengetahui perbandingan kinerja BPRS HIK Parahyangan berdasarkan *maqashid syariah index* dan *sharia conformity and profitability*.

E. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah dalam penelitian ini maka peneliti hanya berfokus pada :

1. Penelitian ini fokus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Parahyangan, data yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi laporan keuangan periode 2018-2020
2. Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja bank yaitu menggunakan metode MSI (*Maqashid Syariah Index*) dan SCnP (*Sharia Conformity and Profitability*)

F. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran agar ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan dan menambah pemahaman mengenai pengukuran kinerja bank syariah bagi akademisi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademik

Sebagai wawasan dan bahan kajian akademik dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang membutuhkan.

- b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pemahaman dalam melakukan analisis kinerja keuangan berbasis syariah.

- c. Instansi (BPRS HIK Parahyangan)

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi PT. BPRS HIK Parahyangan agar dapat mengimplementasikan pengukuran kinerja keuangan berbasis syariah serta dapat memilih alat ukur kinerja yang tepat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematis dalam pembahasan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan membahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variable, instrument penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai penyajian data, analisis data dan interpretasi data

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari skripsi ini